

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil beberapa tahun terakhir juga berimplikasi pada besarnya anggaran untuk pembangunan konstruksi, seperti pembangunan gedung, infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan konstruksi terutama infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah, baik prioritas jangka pendek maupun jangka panjang, karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di dalam negeri.

Keberadaan infrastruktur di suatu negara sangat penting. Bahkan bagi para perancang dan pembuat kebijakan publik, infrastruktur dipandang sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu negara dan rakyatnya. Maka dari itu upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun infrastruktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu negara. Pembangunan infrastruktur yang menjangkau sampai ke pelosok negeri akan meningkatkan mobilitas produksi dari masyarakat. Kegiatan bisnis atau usaha di suatu wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan akses ke wilayah tersebut.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur membuat pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Target pembiayaan infrastruktur selama tahun 2009-2014 untuk memenuhi *Millenium Development Goal* pada tahun 2015 adalah

**Asep Wibowo, 2014**

*Desain kurikulum berbasis kebutuhan pada diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebesar kurang lebih 1400 triliun rupiah, namun kemampuan pendanaan Pemerintah melalui APBN selama 5 tahun hanya sekitar 400 triliun rupiah (KPPOD, 2012). Di tingkat daerah, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan anggaran ini juga dipicu adanya bencana yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan.

Ironisnya, peningkatan anggaran belanja Pemerintah (baik APBN maupun APBD) untuk pembangunan infrastruktur tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur tersebut. Hal ini tampak jelas dengan kondisi jalan dan jembatan yang cepat sekali mengalami kerusakan meskipun jalan atau jembatan tersebut baru beberapa bulan dibangun. Perbuatan penyimpangan-penyimpangan seperti *mark-up*, *mark down* dan korupsi oleh para pihak terkait pembangunan infrastruktur dianggap sebagai penyebab ketidaksesuaian antara peningkatan anggaran dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, pemeriksaan/audit terhadap infrastruktur jalan dan jembatan tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunannya telah taat pada aturan perundangan yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab yang berat bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Besarnya tanggung jawab BPK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang menuntut BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa yang profesional. Dalam melaksanakan pemeriksaan atas suatu konstruksi, para pemeriksa/auditor harus memiliki kompetensi yang memadai agar para pemeriksa dapat menganalisis dan menilai hasil pekerjaan dengan tepat dan akurat, sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta dapat memberikan rekomendasi yang tepat.

Pemeriksa di BPK berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Komposisi terbesar dari pemeriksa tersebut berasal dari latar belakang akuntansi, sebagian kecil non akuntansi dari berbagai bidang studi, antara lain hukum, ekonomi, pertanian, dan teknik. Bidang teknik sendiri terdiri atas teknik sipil, teknik lingkungan, teknik mesin, teknik industri, teknik komputer dan teknik pertambangan. Dari komposisi pemeriksa tersebut dapat dipahami bahwa pemeriksa yang memahami bidang kajian infrastruktur jalan dan jembatan sangat terbatas, karena pemeriksa yang berasal dari latar belakang pendidikan teknik sipil sangat sedikit.

Profesionalisme pemeriksa BPK diimplementasikan dengan cara bahwa setiap pemeriksa yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan harus telah lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional sesuai dengan peran yang diembannya. Selain itu, BPK juga selalu melaksanakan diklat teknis pada bidang-bidang tertentu untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pemeriksa, salah satunya adalah diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan diklat adalah sudah sejauhmana penyelenggaraan diklat tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan atau harapan pengguna (*user*) di tingkat lembaga. Keberhasilan penyelenggaraan diklat sangat tergantung dari perencanaan diklat yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan adalah sebagian besar dari kesuksesan dalam suatu kegiatan.

Berkaitan dengan permasalahan diklat, terdapat beberapa komponen yang akan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan diklat. Diantara komponen-komponen diklat, kurikulum merupakan komponen utama yang sangat penting. Kurikulum merupakan subsistem diklat yang memiliki peranan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan diklat.

Kurikulum merupakan pedoman yang akan menjadi acuan dalam setiap aktivitas diklat. Kurikulum tidak boleh disusun dan dikembangkan secara sembarangan dan asal-asalan karena komponen-komponen yang lain akan berproses dengan berdasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum diklat seyogyanya direncanakan dan didesain sedemikian rupa agar memenuhi apa yang dibutuhkan oleh peserta diklat.

Dokumen kurikulum diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan disusun dalam bentuk sebuah program diklat yang memuat komponen-komponen kurikulum. Komponen tujuan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi yang ingin dicapai adalah peserta diklat setelah mengikuti diklat mampu menguji pekerjaan jalan dan jembatan. Sedangkan kompetensi dasar yang ingin dicapai antara lain setelah mengikuti diklat diharapkan peserta diklat memahami proses perencanaan pekerjaan jalan dan jembatan; memahami proses pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan; memahami proses pengujian pekerjaan jalan dan jembatan; serta dapat menggunakan peralatan pengujian, baik di lapangan maupun di laboratorium.

Indikator hasil belajar tidak dicantumkan dalam program diklat tersebut. Padahal indikator hasil belajar merupakan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta diklat setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Indikator hasil belajar merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, karena kompetensi dasar masih bersifat umum dan sulit diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator hasil belajar bersifat *observable*, artinya apa hasil yang diperoleh peserta diklat setelah mengikuti proses pembelajaran harus dapat diobservasi. Dengan demikian, indikator hasil belajar lebih praktis apabila dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui tingkat efektivitas pencapaian tujuan diklat.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi diklat yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK diketahui bahwa peserta diklat tidak dapat menggunakan peralatan pengujian. Hal ini disebabkan orang yang akan menggunakan peralatan untuk menguji mutu jalan dan jembatan harus memiliki sertifikat keahlian. Artinya kompetensi dasar yang diharapkan bahwa peserta diklat mampu menggunakan peralatan pengujian tidak akan pernah dapat tercapai, karena para peserta diklat tidak memiliki sertifikat keahlian. Dengan demikian tujuan dari diklat tersebut perlu dikaji ulang.

Materi diklat yang disampaikan kepada peserta diklat berdasarkan program diklat terkait dengan konstruksi jalan aspal dan konstruksi beton, yang meliputi: perencanaan, manajemen konstruksi, persyaratan teknis, pelaksanaan pekerjaan lapangan, pengendalian mutu, identifikasi penyimpangan-penyimpangan, tata cara pemeriksaan, serta teori dan praktikum penggunaan alat ukur dan alat uji di lapangan maupun di laboratorium.

Robert Zais (1976, hlm. 343-346) mengemukakan empat kriteria dalam memilih materi kurikulum, yaitu: *significance*, *utility*, *interest*, dan *human development*. Materi dikatakan signifikan apabila memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi, sedangkan *utility* mengandung maksud bahwa materi harus bernilai guna bagi kehidupan peserta didik. Kedua kriteria ini mensyaratkan bahwa materi yang disampaikan dalam diklat harus benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan peserta diklat dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Kriteria *interest* berarti bahwa materi yang disampaikan harus sesuai dengan latar belakang peserta didik dan menarik perhatiannya. Sedangkan kriteria *human development* mensyaratkan bahwa materi harus sesuai dengan perkembangan individu peserta didik.

Peserta diklat menyampaikan bahwa materi yang dibahas kurang aplikatif dan terlalu teoritis. Tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah peserta

setelah mengikuti diklat mampu menguji/memeriksa pekerjaan jalan dan jembatan, sehingga materi yang disampaikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan di lapangan. Materi diklat dalam daftar di atas tidak memuat mengenai bagian-bagian struktur dari jalan dan jembatan. Padahal pemahaman mengenai bagian-bagian dari struktur jalan dan jembatan, mulai dari bagian struktur paling dasar sampai struktur atas, sangat penting dalam melaksanakan pemeriksaan. Kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah kemampuan dalam menghitung volume pekerjaan terpasang, karena hal ini sangat terkait dengan kontrak dan besarnya biaya yang dibayarkan kepada kontraktor/penyedia jasa. Namun, dalam daftar materi hanya terdapat materi mengenai tata cara pemeriksaan dan penilaian keandalan konstruksi jalan aspal dan konstruksi beton terpasang dengan lama pembelajaran selama dua jam pelajaran. Sedangkan dalam pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, terdapat banyak item pekerjaan yang cara perhitungan volume pekerjaannya juga bervariasi. Selain itu dalam daftar materi di atas juga tidak terdapat materi mengenai jembatan. Hal ini juga dituangkan dalam hasil evaluasi diklat bahwa materi tentang jembatan tidak disampaikan. Tentu saja dengan tidak adanya materi tentang jembatan, maka tujuan diklat tidak akan tercapai secara efektif.

Proses pembelajaran dalam diklat ini sesuai dengan program diklat menggunakan pendekatan pembelajaran andragogi, karena peserta diklat adalah orang dewasa. Prinsip andragogis menuntut pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta diklat (*trainee-centered approach*). Penerapan pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode pembelajaran antara lain ceramah, latihan soal, permainan peran/demonstrasi, studi kasus dan diskusi kelompok serta praktik di lapangan. Penerapan metode ini dipandang cukup tepat sesuai dengan karakteristik peserta diklat. Namun

dalam implementasinya, pembelajaran cenderung berpusat pada instruktur/fasilitator (*trainer-centered approach*). Instruktur banyak menggunakan bahasa teknis yang tidak dipahami lulusan non teknik sipil. Hal ini disebabkan metode pembelajaran tersebut tidak diuraikan secara spesifik untuk masing-masing materi diklat, sehingga penyampaian materi menyesuaikan para instruktur karena mereka tidak memiliki acuan penggunaan metode pembelajaran yang jelas.

Instruktur sebagaimana disebutkan dalam program diklat berasal dari perguruan tinggi/universitas, yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia. Memang instruktur dari universitas memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur, namun mereka tidak ahli dalam bidang pemeriksaan. Oleh karena itu, instruktur sebaiknya merupakan kombinasi dari para ahli pada bidang infrastruktur dan ahli pada bidang pemeriksaan/audit sehingga pengalaman belajar peserta diklat lebih lengkap dan aplikatif sesuai dengan kondisi pekerjaannya di lapangan.

Kurikulum/program diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan juga memuat komponen evaluasi. Evaluasi diklat dilakukan untuk mengukur tingkat reaksi dan penyerapan materi diklat oleh peserta diklat. Evaluasi dilakukan dengan mengadopsi model evaluasi empat level dari Kirkpatrick. Namun dalam diklat ini, evaluasi hanya dilakukan pada level 1 dan level 2 saja. Evaluasi level 1 untuk mengukur tingkat reaksi dan *feedback* dari peserta terhadap pelaksanaan diklat. Pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui metode kuisisioner, observasi, atau interviu/diskusi. Sedangkan evaluasi level 2 untuk mengukur tingkat pemahaman materi diklat oleh peserta diklat. Pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, studi kasus, simulasi, role play atau metode lain yang ditentukan oleh masing-masing instruktur atau pembuat materi diklat. Evaluasi level 3 dan level 4 tidak dilakukan karena evaluasi dalam pelaksanaan diklat relatif lebih

sulit daripada evaluasi pada pendidikan formal, terutama pada evaluasi terhadap *output* dan *outcomes*-nya. Hal ini disebabkan adanya kendala jarak dan waktu karena para peserta diklat yang telah kembali ke unit kerjanya masing-masing. Selain itu cukup sulit untuk menentukan bahwa peningkatan kinerja dari pemeriksa benar-benar hasil dari keikutsertaan diklat dan bukan karena pengaruh lain. Oleh karena itu diperlukan kajian lagi mengenai penentuan teknik evaluasi yang tepat sesuai kebutuhan.

Diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan selama lima hari. Peserta diklat merupakan pemeriksa yang berasal dari BPK pusat dan perwakilan, baik perwakilan wilayah timur maupun wilayah barat. Peserta diklat berasal dari latar belakang pendidikan formal yang berbeda-beda, namun sebagian besar berasal dari jurusan ekonomi akuntansi.

Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan diklat teknis tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar peserta diklat untuk menunjang kegiatan pemeriksaan di lapangan? Tentu saja jawaban dari pertanyaan ini memerlukan pengkajian yang mendalam. Namun, berdasarkan hasil *post-test* terhadap kemampuan kognitif dari 24 peserta diklat di Pusdiklat Jakarta, hanya 10 peserta atau 41,67% saja yang memenuhi Nilai Kelulusan Minimal (skor 65). Hal ini mengindikasikan bahwa peserta diklat belum memahami materi yang disampaikan serta belum memenuhi tujuan diklat yang telah ditetapkan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kurikulum diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan masih terdapat beberapa kelemahan pada perumusan komponen-komponennya. Oleh karena itu, kurikulum diklat tersebut perlu didesain ulang sehingga komponen-komponennya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta diklat. Leslie Rae (2005, hlm. 3) mengemukakan bahwa: “Boleh saja Anda memberikan air kepada kucing piaraan Anda, tetapi jangan berharap Anda bisa membuat kucing tersebut meminumnya.” Leslie Rae bermaksud bahwa dalam melaksanakan pelatihan

kita harus memberikan materi yang tepat dan benar-benar dibutuhkan oleh para peserta diklat sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan diklat maka sebelumnya harus dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk menilai kebutuhan-kebutuhan diklat tersebut. Salah satu bentuk perencanaan diklat adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar merupakan upaya untuk mengidentifikasi ketimpangan atau kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang sudah dimiliki pemeriksa sebagai calon peserta diklat dengan kompetensi standar yang harus dimiliki oleh pemeriksa sesuai tuntutan pekerjaan/lembaga kerja. Identifikasi kebutuhan belajar diperlukan untuk menentukan kebutuhan mana yang paling potensial dari segi tingkat kemanfaatan dan kemudahan pemenuhannya dalam penyelenggaraan diklat. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan belajar berguna untuk mendesain kurikulum diklat, sehingga tujuan dari kegiatan diklat dapat tercapai secara efektif.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan pada dasarnya merupakan bagian dari program peningkatan kualitas hasil pemeriksaan secara menyeluruh, karena untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang andal dan berkualitas dibutuhkan para pemeriksa yang berkualitas pula. Kegiatan diklat dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab profesionalnya.

Namun efektivitas diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan dianggap masih belum memadai, karena hanya 41,67% peserta diklat yang memenuhi Nilai Kelulusan Minimal. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta diklat belum memahami materi yang disampaikan serta belum memenuhi

tujuan diklat yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan ini antara lain disebabkan oleh:

1. Latar belakang pendidikan formal para peserta diklat yang sebagian besar bukan dari teknik sipil sehingga kurang memahami istilah-istilah teknis;
2. Waktu pelaksanaan diklat selama lima hari terlalu singkat;
3. Penentuan sebagian tujuan diklat yang kurang tepat;
4. Materi yang diajarkan terlalu teoritis serta kurang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta diklat karena kurang aplikatif;
5. Materi yang diajarkan kurang menyeluruh, terutama materi tentang jembatan;
6. Metode pembelajaran yang cenderung *trainer oriented* sehingga kurang menyesuaikan dengan materi serta karakteristik dan keinginan peserta diklat;
7. Instruktur yang hanya berasal dari ahli di bidang infrastruktur tanpa melibatkan instruktur dari bidang pemeriksaan/audit;
8. Evaluasi diklat yang belum dilakukan secara menyeluruh.

Permasalahan yang berhasil diidentifikasi di atas banyak berkaitan dengan kurikulum diklat. Mengingat luasnya bidang kajian kurikulum, maka peneliti akan membatasi masalah penelitian, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis berupa desain kurikulum diklat. Karena desain kurikulum diklat juga mencakup aktivitas yang sangat kompleks, maka masalah penelitian ini lebih difokuskan lagi pada desain kurikulum berdasarkan kebutuhan belajar tanpa melakukan penilaian kompetensi yang telah dimiliki oleh calon peserta diklat. Kompetensi *existing* tersebut telah tergambar dari: (1) hasil evaluasi diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan; (2) latar belakang pendidikan formal para auditor/pemeriksa yang sebagian besar bukan dari teknik sipil, sehingga mereka kurang memahami bidang infrastruktur jalan dan jembatan; serta (3) banyaknya penyimpangan atas

pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, baik kuantitas maupun kualitasnya, yang tidak terungkap oleh pemeriksa saat melaksanakan pemeriksaan.

Alasan pembatasan ini adalah kurikulum diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan kurikulum yang unik, artinya desain kurikulumnya bukan semata-mata berasal dari kajian teoritis, tetapi lebih bersumber dari pendapat para praktisi di bidang pemeriksaan (audit) serta praktisi di bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Sehingga diharapkan materi kurikulum diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Namun demikian, penelitian ini hanya mengembangkan produk berupa desain kurikulum diklat secara teoritis saja tanpa dilakukan ujicoba secara empiris.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, rumusan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah: “Desain kurikulum berbasis kebutuhan yang bagaimanakah yang sesuai untuk diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan?” Rumusan permasalahan tersebut dapat dijabarkan ke dalam submasalah penelitian sebagai berikut:

1. Komponen-komponen kurikulum yang bagaimanakah yang sesuai dengan kebutuhan pada diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan? Submasalah penelitian ini diuraikan ke dalam empat pertanyaan penelitian sebagai berikut:
  - a. Rumusan tujuan diklat seperti apakah yang sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki pemeriksa?
  - b. Materi diklat apa saja yang sesuai kebutuhan belajar peserta diklat dari berbagai macam latar belakang pendidikan formal?
  - c. Metode pembelajaran apa saja yang sesuai dengan tujuan, materi dan peserta diklat tersebut?

- d. Metode evaluasi yang bagaimanakah yang sesuai untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan diklat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menunjang desain kurikulum berbasis kebutuhan yang bagaimanakah yang sesuai untuk diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan? Submasalah penelitian ini diuraikan ke dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:
  - a. Kualifikasi apakah yang harus dimiliki peserta diklat?
  - b. Kualifikasi apakah yang harus dimiliki instruktur diklat?
  - c. Sarana-prasarana pendukung apa saja yang harus tersedia?

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Desain Kurikulum**

Desain kurikulum adalah rancangan pengorganisasian komponen-komponen kurikulum diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan.

##### **2. Kebutuhan**

Kebutuhan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kebutuhan belajar, yaitu kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang telah dimiliki pemeriksa dengan kompetensi yang dituntut atau harus dimiliki pemeriksa sehingga mampu melaksanakan tugas pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan dengan baik dan profesional.

##### **3. Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi pemeriksa/auditor BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah untuk pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menentukan desain kurikulum berbasis kebutuhan yang sesuai untuk diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menentukan komponen-komponen kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pada diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan, yang meliputi:
  - a. Rumusan tujuan diklat yang sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki pemeriksa;
  - b. Materi diklat yang sesuai kebutuhan belajar peserta diklat dari berbagai macam latar belakang pendidikan formal;
  - c. Metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi dan peserta diklat tersebut;
  - d. Metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan diklat.
2. Menentukan faktor-faktor penunjang dalam desain kurikulum berbasis kebutuhan untuk diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan, yang meliputi:
  - a. Kualifikasi yang harus dimiliki peserta diklat;
  - b. Kualifikasi yang harus dimiliki instruktur diklat; dan
  - c. Sarana-prasarana pendukung yang harus tersedia.

**Asep Wibowo, 2014**

*Desain kurikulum berbasis kebutuhan pada diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## F. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin, baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menemukan desain kurikulum sesuai dengan teori pengembangan kurikulum, khususnya berkenaan dengan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pusdiklat BPK, yaitu sebagai masukan untuk mengambil kebijakan dalam mengembangkan kurikulum diklat sesuai dengan kebutuhan, khususnya kurikulum diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pengguna, yaitu sebagai masukan dalam memanfaatkan lulusan peserta diklat sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari pelaksanaan diklat pemeriksaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kepentingan instansi;
- c. Peserta diklat, yaitu sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi pemeriksa sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- d. Program studi pengembangan kurikulum, yaitu sebagai bahan masukan dalam mengembangkan model desain kurikulum pendidikan dan pelatihan yang bersifat aplikatif di lapangan;
- e. Peneliti lainnya, yaitu sebagai acuan dalam pengembangan model desain kurikulum yang lain serta materi yang lain pula.